

TAX RATIO RENDAH |

TARGET RASIO PAJAK PESIMISTIS

Bisnis, JAKARTA — Meningkatnya ketidakpastian ekonomi serta ancaman melonjaknya inflasi mendorong pemerintah untuk lebih realistis dalam memasang angka sasaran rasio pajak pada tahun ini dan tahun depan.

Tegar Arief
tegararief@bisnis.com



Keterangan	2019	2020	2021	Outlook 2022	RAPBN 2023
Realisasi	8,4	6,9	7,5	8,6	8,2
Tanpa PPS & Dampak Komoditas	8,4	6,9	6,8	6,8	7,2

Data Penerimaan Pajak (Rp Triliun)

Tahun	Total	Dampak Komoditas	PPS
2019	1.332,7	-	-
2020	1.072,1	-	-
2021	1.278,6	117,8	-
Outlook 2022	1.608,1	279,8	61,0
RAPBN 2023	1.715,1	211,0	-

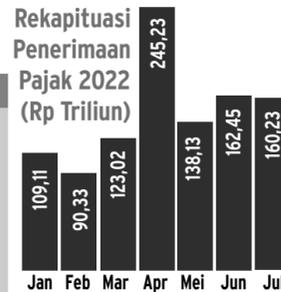
Fakta Penerimaan Pajak

- Dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas.
- Perang dagang AS-China 2019 mendorong perlambatan perdagangan dan melemahnya harga komoditas.
- Pandemi Covid-19 pada 2020 mengakibatkan kontraksi ekonomi dan besarnya insentif pajak.
- Ekonomi mulai pulih pada 2021 sehingga mendorong perbaikan ekspor-impor dan harga komoditas.

TANTANGAN KIAN BERAT

Upaya untuk mengontrol rasio pajak kian menantang, mengingat struktur penerimaan negara yang masih bergantung pada komoditas.

Sumber: Kementerian Keuangan
BISNIS/ILYAS



Bulan	Industri Pengolahan	Perdagangan	Pertambangan
Januari	55,4	51,4	247,0
Februari	24,6	51,3	149,9
Maret	54,2	75,6	109,7
April	60,0	70,6	374,2
Mei	50,6	117,6	1.317,9
Juni	58,8	46,9	266,6
Juli	54,4	61,1	119,5

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diperoleh *Bisnis*, outlook rasio pajak pada tahun ini berada pada posisi 8,6%, sedangkan tahun depan diprediksi turun menjadi 8,2%.

Faktanya, outlook penerimaan pajak pada tahun ketiga pandemi Covid-19 mencapai Rp1.608,1 triliun, angka tertinggi sepanjang sejarah perpajakan nasional.

Sasaran rasio pajak tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan penghitungan yang mengacu pada outlook penerimaan pajak dengan estimasi produk domestik bruto (PDB).

Dengan menggunakan asumsi PDB di dalam APBN 2022 yang berada di angka Rp17.897,3 triliun, maka rasio pajak pada tahun ini idealnya mampu berada pada posisi 8,98%.

Artinya, lebih rendahnya *tax ratio* yang ditargetkan pemerintah tersebut mengindikasikan adanya pesimisme pemangku kebijakan dalam mengejar target pajak.

Sementara itu, Kementerian Keuangan dalam data yang diperoleh *Bisnis* menuliskan bahwa penerimaan pajak amat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas.

"Ditjen Pajak terus meningkatkan upaya optimalisasi penerimaan melalui pengawasan pembayaran masa dan pengujian kepatuhan," tulis data yang dikutip *Bisnis*, Selasa (6/9).

Tak bisa dimungkiri, komoditas memang menjadi mesin utama pendorong penerimaan negara sehingga berpotensi mendorong rasio pajak.

Hal itu pun tercermin dalam penghitungan otoritas fiskal perihal angka rasio pajak dengan mengesampingkan dua katalis utama pendongkrak penerimaan, yakni Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan kenaikan harga komoditas.

Tanpa adanya PPS dan kenaikan harga komoditas, rasio pajak pada tahun ini hanya mencapai 6,8%, sementara tahun depan di angka 7,2%. (Lihat infografik).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (5/9), pun mengakui bahwa komoditas menjadi salah satu faktor penentu tergapainya target rasio pajak.

"Harga komoditas kontribusinya cukup dominan, bisa antara 10%–20% terhadap total penerimaan pajak yang kemudian memengaruhi *tax ratio*," kata Menkeu.

Adapun, pada tahun depan Sri Mulyani berdalih target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk performa pajak memang lebih konservatif, mengingat masih tingginya ketidakpastian ekonomi.

Hal tersebut disebabkan oleh dinamika geopolitik antara Rusia dan Ukraina, lonjakan inflasi di sejumlah negara, serta dampaknya pada pergerakan suku bunga acuan di bank sentral utama dunia.

"Ini menjadi tantangan pengelolaan keuangan negara," tegas Menkeu.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menambahkan, otoritas pajak akan terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mengontrol *tax ratio*.

Di antaranya adalah optimalisasi aktivitas pengawasan, pemeriksa-

an, penegakan hukum, hingga implementasi UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Perubahan harga komoditas [juga] harus kami awasi realisasi pembayaran pajaknya pada tahun-tahun ketika komoditas naik," kata Suryo.

Dia pun tak memungkiri bahwa *tax ratio* di Indonesia menjadi salah satu yang terendah di Asia Pasifik.

Pengakuan itu pun ditegaskan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan berjudul *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022*.

Laporan tersebut mencatat, realisasi rasio pajak Indonesia pada 2020 hanya 10,1%, sedangkan rata-rata Asia Pasifik berada di angka 19,1%.

Indonesia hanya mampu parkir di atas dua negara kecil Asia, yakni Bhutan dan Laos.

Dalam menyusun laporan rasio pajak, OECD memiliki standar yang berbeda, yakni dengan membandingkan penerimaan pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), serta pajak daerah dengan PDB.

Akan tetapi, apabila Indonesia menggunakan pemaknaan rasio pajak sesuai dengan standar OECD itu pun realisasi yang terpantau pada 2020 masih amat rendah.

Suryo menjelaskan, *tax ratio* yang membandingkan penerimaan pajak serta bea dan cukai dengan PDB berkisar 10%. Kemudian, kontribusi PNBP SDA sebesar 1,5%, dan pajak daerah 1,5% sehingga total *tax ratio* hanya 13%.

Harga komoditas kontribusinya cukup dominan, bisa antara 10%–20%.

"Tentu ini terbilang masih rendah dibandingkan dengan negara lain," ujarnya.

Perihal rendahnya capaian rasio pajak, Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menyuarakan kepada pemerintah untuk mengidentifikasi beragam faktor yang menggerakkan *tax ratio* untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Perlu upaya ekstra, dan ini menjadi tugas bersama kita untuk melakukan perubahan," ujarnya.

TAX GAP

Sementara itu, kalangan pemerhati pajak memandang besarnya *tax gap* atau pajak yang tidak terpungut menjadi biang kerok rendahnya rasio pajak di Tanah Air.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menjelaskan ada beberapa penyebab besarnya potensi penerimaan yang tidak terpungut sehingga menjadi pengganjal akselerasi rasio pajak.

Pertama, adanya perbedaan antara kewajiban pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang pada

tahun pajak tertentu, dan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara sukarela dan tepat waktu dalam periode tersebut.

Kedua, adanya praktik pengelakan pajak atau *tax evasion* dan penghindaran pajak alias *tax avoidance*.

Tax evasion terjadi ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara ilegal dan melanggar peraturan.

Adapun, *tax avoidance* muncul karena wajib pajak dapat mengoptimalkan biaya pajak dengan cara mencari celah peraturan perpajakan sehingga memberikan keuntungan atau *tax loopholes*.

"*Tax avoidance* itu legal, tetapi tidak sesuai dengan spirit pembuat kebijakan, sedangkan *tax avoidance* muncul karena ketidaksempurnaan peraturan pajak yang disusun," jelasnya kepada *Bisnis*.

Prianto memerinci, ada tiga jenis *tax gap* di Indonesia. Pertama, *nonfiling gap*, yaitu ketika wajib pajak tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai batas waktu.

Kedua, *underreporting gap*, yakni wajib pajak kurang melaporkan penghasilan atau mencatat biaya pengurang penghasilan lebih besar.

Ketiga, *underpayment gap* yang terjadi ketika wajib pajak tidak membayar semua utang pajak yang seharusnya dilaporkan.

Menurutnya, dalam kaitan mengontrol *tax ratio*, pemerintah wajib mempersempit *tax gap*, yakni dengan merumuskan peraturan yang mono semantik atau satu makna.

"Dengan demikian, potensi ambiguitas dan multiinterpretasi dapat diminimalkan," ujarnya.

| PRESIDENSI G20 |

Blue Economy Dimatangkan

Bisnis, TANJUNG PANDAN — Agenda untuk mewujudkan *blue economy* atau ekonomi biru menjadi isu strategis yang akan dibahas dalam pertemuan Menteri Pembangunan atau Development Ministerial Meeting G20 di Belitung. Deputy Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan transformasi menuju ekonomi biru menjadi agenda penting.

Pasalnya, kerusakan lingkungan menjadi ancaman yang serius. Sejalan dengan itu, Indonesia selaku pemegang Presidensi G20 akan mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai isu tersebut.

"*Blue economy* ini potensial untuk mendorong pertumbuhan dan lebih inklusif. Ini sejalan dengan poin-poin Sustainable Development Goals (SDGs)," ujarnya, Selasa (6/9).

Amalia menilai bahwa pembahasan dalam side event maupun pertemuan para menteri akan memberikan ide-ide baru dalam penyusunan peta jalan (*roadmap*) ekonomi biru Indonesia.

Dokumen peta jalan ekonomi biru rencananya akan diterbitkan oleh Kementerian PPN pada tahun depan. (Wibi Panegstu Pratama)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian		30 Jun-22	31 Des-21
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	107.576.364	331.494.093	
Piutang usaha pihak ketiga	11.448.670.863	26.429.260.597	
Piutang lain-lain	-	-	
Pihak berelasi	1.142.764.253	1.142.764.253	
Pihak ketiga	8.419.479	8.492.736	
Pajak dibayar dimuka	2.358.791.938	2.358.989.338	
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	17.659.351.003	15.880.501.001	
Aset lancar lain-lain	841.005.461	841.005.461	
Jumlah Aset Lancar	33.561.579.361	36.235.507.479	
ASET TIDAK LANCAR			
Deposito yang dibatasi penggunaannya	24.360.725.449	26.680.059.309	
Aset tidak bergerak	1.560.713.886	1.237.773.368	
Uang muka jangka panjang	15.378.293.600	15.355.793.600	
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 7.134.705.366 dan Rp 6.798.390.725, masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2021 (Diaudit)	321.630.289.283	320.950.598.485	
Aset tak berwujud	66.459.535.718	66.459.535.718	
Goodwill	-	-	
Aset lain-lain	60.000.000	124.695.000	
Jumlah Aset Tidak Lancar	429.458.537.596	430.788.455.480	
JUMLAH ASET	463.020.137.297	467.023.962.959	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	8.889.637.396	8.954.238.276	
Utang usaha pihak ketiga	2.160.000.000	2.160.000.000	
Utang lain-lain	-	-	
Pihak berelasi	3.958.933.005	3.800.533.005	
Pihak ketiga	837.675.420	837.675.420	
Utang pajak	5.136.693.888	5.213.288.169	
Beban akrual	13.456.997.785	12.650.807.023	
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu periode:			
Utang pembelian aset tetap	593.073.013	733.813.545	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	35.032.009.507	34.310.355.438	
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pihak berelasi non-utang	55.839.709.092	58.839.514.117	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.543.152.619	2.543.152.619	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu periode	-	-	
Utang pembelian aset tetap	5.817.807.386	5.817.807.386	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	64.200.669.097	67.200.474.122	
JUMLAH LIABILITAS	99.232.678.604	101.510.829.560	
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham	-	-	
Modal dasar - 8.800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100	-	-	
Modal ditempatkan dan disetor - 2.750.000.000 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2021 (Diaudit)	275.000.000.000	275.000.000.000	
Tambahan modal disetor	46.574.881.122	46.574.881.122	
Seluruh nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	(10.625.770.020)	(10.625.770.020)	
Saldo laba (defisit)	2.688.584.212	4.433.143.033	
Jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk	313.637.695.314	315.382.254.135	
Keperluan non-pengendali	50.149.763.379	50.139.879.264	
JUMLAH EKUITAS	363.787.458.693	365.522.133.399	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS			
	463.020.137.297	467.023.962.959	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian		30 Jun-22	30 Jun-21
BENDAPATUAN USAHA			
BEBAN POKOK PENJUALAN			
LABA KOTOR			
BEBAN USAHA	-	3.992.602.893	
Umum dan administrasi	(2.407.519.021)	(1.424.273.065)	
Beban usaha lainnya	(4.180.498.719)	(4.180.498.719)	
Jumlah beban usaha	(2.407.519.021)	(4.180.498.719)	
LABA (RUGI) USAHA	(2.407.519.021)	(2.792.225.656)	
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan bunga	232.401.679	345.867.569	
Beban busana dan keamanan lainnya	(748.353.723)	(1.026.941.184)	
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - bersih	83.136	4.920	
Rugi penjualan entitas anak	-	-	
Penjualan utang	-	-	
Dampak pengakuan nilai wajar atas utang lain-lain pihak berelasi lain-lain - bersih	865.772.704	(11.522.076)	
Lain-lain - bersih	349.903.797	(897.590.771)	
Lain-lain - Bersih	(2.057.815.224)	(3.448.816.421)	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(2.057.815.224)	(3.448.816.421)	
PENGHASILAN PAKAIK - Bersih	331.940.518	535.231.108	
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	(1.725.674.706)	(2.913.585.313)	
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
JUMLAH LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	(1.725.674.706)	(2.913.585.313)	
YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Pemilik entitas induk	(1.744.558.821)	(2.910.927.505)	
Keperluan non-pengendali	18.884.115	(2.657.808)	
(1.725.674.706)	(2.913.585.313)		
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF			
YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS ANAK	(1.744.558.821)	(2.825.514.304)	
Pemilik entitas anak	18.884.115	727.083	
Keperluan non-pengendali	(1.725.674.706)	(2.824.787.221)	
(1.725.674.706)	(2.824.787.221)		
SAHAM			
	(0,63)	(1,06)	

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian		30 Jun-22	30 Jun-21
Ekuitas yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021 (Diaudit)	275.000.000.000	46.574.881.122	(10.625.770.020)
Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit)	313.637.695.314	315.382.254.135	365.522.133.399
Ekuitas yang Tidak Didistribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021 (Diaudit)	-	-	-
Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit)	50.149.763.379	50.139.879.264	50.139.879.264
Jumlah Ekuitas			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021 (Diaudit)	275.000.000.000	46.574.881.122	(10.625.770.020)
Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit)	363.787.458.693	365.522.133.399	365.522.133.399